

“PERAN KIAI DALAM MOBILISASI POLITIK MELALUI JARINGAN KIAI SANTRI NASIONAL (JKSN) JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024”

Laura Annisa Sinarsari*), Muhammad Adnan**)

Email: lauraannisa0@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menunjukkan dinamika politik yang kompleks, di mana berbagai aktor memiliki peran strategis dalam mobilisasi pemilih. Salah satu aktor penting dalam konteks politik Islam adalah kiai, yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, terutama di wilayah dengan basis santri yang kuat seperti Jawa Timur. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis alasan kiai serta proses dalam mobilisasi politik melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 2024. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada JKSN di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami alasan serta proses mobilisasi politik yang dilakukan kiai. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kiai berperan sebagai *informal leader* yang menjembatani kandidat dengan pemilih melalui pendekatan berbasis keagamaan dan kultural. Dengan alasan yang kompleks dan multidimensi, melalui JKSN kiai menggunakan berbagai strategi mobilisasi, seperti pengajian, dakwah, dan jaringan pesantren, guna membangun dukungan politik bagi kandidat Prabowo-Gibran. Pengaruh kiai dalam menentukan preferensi politik masyarakat diperkuat oleh kedekatan emosional dan kepercayaan santri serta masyarakat terhadap mereka yang didukung dengan alasan-alasan yang mereka miliki. Penulisan ini menyimpulkan bahwa peran kiai dalam mobilisasi politik melalui JKSN memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik dan mengarahkan pilihan politik masyarakat. Studi ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara agama dan politik serta implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia khususnya Jawa Timur. Untuk meningkatkan efektivitas mobilisasi politik berbasis keagamaan di masa depan, JKSN perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis, memanfaatkan teknologi dan media sosial, menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan, serta mempertahankan dan mengembangkan jaringan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti OPOP dengan tetap menjaga esensi dari peran mereka sebagai pemimpin spiritual.

Kata Kunci: Kiai, Mobilisasi Politik, JKSN, Pemilihan Presiden 2024, Jawa Timur.

ABSTRACT

The 2024 Presidential Election in Indonesia shows complex political dynamics, where various actors have strategic roles in voter mobilization. One important actor in the context of Islamic politics is the kiai, who has a great influence on society, especially in areas with a strong santri base such as East Java. This paper aims to analyze the reasons for the kiai and the process of political mobilization through the National Kiai Santri Network (JKSN) in East Java in the 2024 Presidential Election. This paper uses a qualitative approach with a case study method on JKSN in East Java. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The analysis was carried out using a descriptive-analytical approach to understand the reasons and process of political mobilization carried out by the kiai. The results of the paper show that the kiai play a role as an informal leader who bridges candidates with voters through a religious and cultural-based approach. With complex and multidimensional reasons, through JKSN the kiai use various mobilization strategies, such as pengajian, da'wah, and pesantren networks, to build political support for the Prabowo-Gibran candidates. The influence of kiai in determining the political preferences of the community is strengthened by the emotional closeness and trust of the santri and the community towards them which is supported by the reasons they have. This paper concludes that the role of kiai in political mobilization through JKSN has a significant impact in shaping public opinion and directing the political choices of the community. This study provides insight into the relationship between religion and politics and its implications for democracy in Indonesia, especially East Java. To increase the effectiveness of religious-based political mobilization in the future, JKSN needs to adopt a more inclusive and dialogical approach, utilize technology and social media, maintain a balance between political interests and religious values, and maintain and develop networks through economic empowerment programs such as OPOP while maintaining the essence of their role as spiritual leaders.

Keywords: *Kiai, Political Mobilization, JKSN, 2024 Presidential Election, East Java.*

A. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi telah menjadi fondasi pemerintahan Indonesia sejak era reformasi 1998. Sebagaimana diungkapkan Abraham Lincoln menegaskan bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan prinsip yang diwujudkan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut UU Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Pemilu Presiden 2024 menjadi pemilihan presiden kelima sejak pertama kali diselenggarakan pada 2004. Pada Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari, terdapat tiga pasangan calon yang berkompetisi: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (didukung NasDem, PKB, dan PKS),

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (didukung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Garuda), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD (didukung PDIP, PPP, PERINDO, dan Hanura). Penetapan ini secara resmi dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023.

Provinsi Jawa Timur memiliki posisi sangat strategis dalam pemilihan presiden karena menyumbang sekitar 16% dari total pemilih nasional. Menariknya, dalam empat kali Pemilu Presiden sejak 2004 hingga 2019, pasangan calon yang unggul di Jawa Timur selalu menjadi pemenang Pemilu Presiden secara nasional. Fakta ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu kunci kemenangan dalam pemilihan presiden.

Dalam dinamika politik Jawa Timur, peran kiai memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mobilisasi massa pemilih. Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) yang dibentuk oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak awalnya dibentuk untuk mendukung kemenangan Khofifah-Emil dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Namun kemudian, jaringan ini berkembang dan berperan penting dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, hingga akhirnya mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Meskipun tidak memiliki hubungan struktural dengan Nahdlatul Ulama (NU), JKSN telah membuktikan diri sebagai mesin mobilisasi suara yang sangat efektif.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dewi (2019), Pada setiap pemilihan umum (pemilu) suara kiai dan pengikutnya selalu diperebutkan karena dinilai bisa meraih lebih banyak suara pemilih khususnya santri, wali santri, alumni dan simpatisannya. Strategi pemanfaatan pengaruh kiai ini tidak hanya diterapkan oleh partai-partai berbasis Islam, tetapi juga oleh partai-partai nasionalis, yang mengakui peran kiai sebagai magnet elektoral yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Hasil Pemilu Presiden 2024 di Jawa Timur memperlihatkan dominasi yang sangat kuat. Dari 31.402.838 pemilih terdaftar, sebanyak 25.644.060 suara sah tercatat dengan rincian: Prabowo-Gibran unggul telak dengan perolehan 65,2% (16.716.603 suara), jauh melampaui Anies-Muhaimin dengan 17,5% (4.492.652 suara) dan Ganjar-Mahfud dengan 17,2% (4.434.805 suara). Angka ini secara jelas menunjukkan besarnya pengaruh mobilisasi politik yang dilakukan oleh para kiai melalui JKSN.

Fenomena dukungan JKSN terhadap Prabowo-Gibran ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama mengingat bahwa Prabowo sebelumnya merupakan oposisi Jokowi pada Pemilu 2019. Strategi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Daerah Jawa Timur bersama para kiai dalam upaya memenangkan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika politik Indonesia yang kompleks dan terus

berkembang. Hal ini memberikan gambaran berharga tentang bagaimana jaringan keagamaan dapat mempengaruhi lanskap politik nasional dan menjadi faktor penentu dalam hasil pemilihan umum.

Penelitian sebelumnya tentang peran kiai dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur telah diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Dafis Ubaidillah Assiddiq. Di mana penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan peran kiai di Jawa Timur bersama TKD (Tim Kampanye Daerah) Jawa Timur dan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) saat pilpres 2019. Dalam penelitian ini diungkap bahwa kiai khususnya kiai JKSN berperan sebagai Opinion Leader, Mediator Politik dan Vote Getter.

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Mukari, Moch. Mubarak Muharam, dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah dengan judul “Kiai sebagai Kekuatan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur” pun menganalisis kekuatan politik kiai dalam Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Jawa Timur. Pada penulisan ini dikemukakan bahwa kiai telah berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dan dapat meminimalisir adanya politik identitas di Jawa Timur.

Untuk membuat *Gap Research* penulisan sebelumnya dan penulisan yang akan dibuat, penulis mencari tahu tentang alasan yang membuat kiai JKSN turut serta

dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 sebagai presiden. Tidak hanya itu, dalam penulisan ini juga mencari tahu bagaimana proses mobilisasi politik yang dilakukan kiai sebagai *informal leader* melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN).

B. KERANGKA TEORI

a) Konsep Informal Leader

Kepemimpinan adalah aspek fundamental dalam kehidupan sosial. Fairchild (dalam Liow et al., 2015) mendefinisikan pemimpin sebagai individu yang mengarahkan perilaku orang lain melalui wewenang atau pengaruh, Soelistya (2022) menambahkan bahwa pemimpin memiliki kemampuan mempengaruhi dan membimbing orang lain mencapai tujuan bersama.

Dalam masyarakat terdapat pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal memperoleh pengakuan resmi, sedangkan pemimpin informal mendapatkan pengaruh melalui keunggulan pribadi tanpa posisi resmi (Sari, 2023:33-34). Syah (dalam Supriati, 2018) menyebutkan bahwa pemimpin informal dapat berupa tokoh agama seperti kiai atau ulama yang dihormati karena keahlian dan kharisma. Kepercayaan masyarakat terbentuk melalui pengalaman dan kepemimpinan yang teruji (Bramantyo & Kusumaningrum, 2024). Mereka berperan dalam berbagai bidang,

termasuk agama, pendidikan, dan politik (Wahidin dkk., 2017), dengan pengaruh luas di tingkat lokal maupun nasional.

Kiai sebagai pemimpin informal memiliki pengaruh besar dalam politik, mampu membentuk opini dan mobilisasi massa. Patoni (2019) menyebutkan kiai tidak hanya membimbing moral tetapi juga berperan dalam politik dengan memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.

Sari (2023:35-36) mengidentifikasi enam ciri pemimpin informal: memimpin tanpa pengangkatan resmi, diakui secara spontan, tidak berafiliasi dengan organisasi formal, tidak menerima kompensasi, posisi tidak dapat diwariskan, dan kesalahan tidak dikenai sanksi formal.

Dalam politik, kiai sebagai pemimpin informal memiliki pengaruh besar, terutama dalam membentuk opini dan mobilisasi massa. Patoni (2019) menyatakan bahwa kiai tidak hanya membimbing moral masyarakat tetapi juga terlibat dalam politik, sering kali mendukung kandidat tertentu dalam pemilu. Pengaruh mereka dapat menentukan hasil pemilu dan kebijakan yang dihasilkan.

Bramantyo & Kusumaningrum (2024) menekankan bahwa pemimpin informal memainkan peran krusial dalam pembangunan masyarakat. Mereka memahami kebutuhan masyarakat dan memimpin tanpa pengakuan formal.

Contohnya, dalam Pemilu 2024, kiai dalam Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Jawa Timur mendukung pasangan Prabowo-Gibran, menunjukkan peran pemimpin informal dalam mobilisasi politik.

Dengan demikian, kepemimpinan informal memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik, mencerminkan dinamika masyarakat dan pengaruh personal dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.

b) Konsep Jaringan Kiai dan Politik

Jaringan kiai di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam dinamika sosial, budaya, dan politik, dengan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang juga berperan dalam membentuk opini publik serta memberikan legitimasi politik. Robert W. Hefner dalam *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (2000) menekankan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang berpengaruh dalam demokratisasi.

Sejalan dengan itu, Miftah Qomar dalam *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (2002) menjelaskan bahwa pesantren tidak lagi sekadar pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi basis pergerakan politik. Demokratisasi institusi pesantren membuka ruang bagi keterlibatan santri dalam politik formal

tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya.

Hefner juga mencatat bahwa kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh. Jaringan pesantren yang mereka pimpin telah menjadi salah satu institusi sosial paling berkelanjutan di Indonesia. Clifford Geertz dalam *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (2013) turut memperkuat pandangan ini dengan menggambarkan santri sebagai kelompok sosial yang memiliki kedekatan dengan Islam normatif, sementara kiai berperan sebagai pemimpin yang membentuk identitas keislaman mereka.

Jaringan kiai berfungsi sebagai alat mobilisasi politik melalui pesantren, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), serta hubungan personal antara kiai dan santri. Hefner menyoroti sifat adaptif kiai dalam merespons perubahan politik tanpa kehilangan otoritas tradisionalnya. Fenomena ini terlihat dalam pengelolaan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) pada Pemilihan Presiden 2024, yang mencerminkan kombinasi konservatisme kultural dengan pragmatisme politik.

c) Konsep Mobilisasi Politik

Mobilisasi politik merupakan bentuk aksi kolektif yang melibatkan aktor berpengaruh dalam menggerakkan massa

untuk mencapai tujuan tertentu (Tilly, 1978:7). Proses ini umumnya terjadi akibat keluhan mendasar dalam masyarakat (Somma, 2023) dan dipengaruhi oleh empat faktor utama: kepentingan, organisasi, sumber daya, serta peluang politik (McAdam, 2003). Keberhasilan mobilisasi tidak hanya bergantung pada popularitas individu, tetapi juga pada kemampuan mengelola komponen-komponen tersebut secara strategis.

Gambar 1. Kerangka Mobilisasi

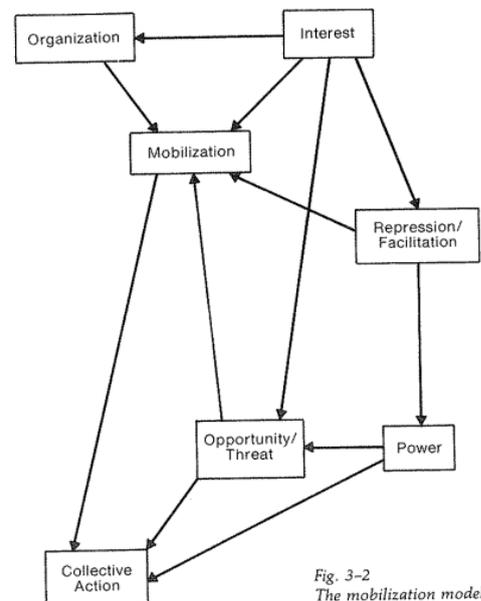


Fig. 3-2
The mobilization model

Sumber: *From Mobilization to Revolution* (Tilly, 1978)

Tilly (1978) menjelaskan bahwa seorang aktor berpengaruh harus mampu mengartikulasikan kepentingan publik, membangun reputasi politik, serta mengelola organisasi yang solid. Kemampuan dalam menggalang dana, mengkoordinasikan kampanye, dan memanfaatkan media menjadi faktor kunci

dalam keberhasilan mobilisasi politik. Selain itu, pemahaman terhadap peluang politik seperti perubahan kebijakan, perpecahan elite, atau ketidakpuasan publik dapat menjadi momentum strategis dalam mobilisasi dukungan (McAdam, 2001).

McAdam (2001) juga menekankan tiga faktor utama dalam praktik mobilisasi politik: pertama, peluang politik yang menguntungkan, seperti kondisi politik yang membuka ruang bagi pergerakan sosial; kedua, kekuatan organisasi di tingkat akar rumput yang berperan dalam penyediaan sumber daya dan koordinasi aksi kolektif; dan ketiga, kesadaran kolektif (*cognitive liberation*), yaitu perubahan cara pandang masyarakat terhadap ketidakadilan dan keyakinan bahwa perubahan dapat dicapai melalui tindakan kolektif.

Dalam konteks politik Indonesia, mobilisasi politik oleh pemimpin informal seperti kiai menjadi fenomena yang signifikan. Hefner (2000) dan Geertz (2013) menunjukkan bahwa kiai tidak hanya memiliki peran sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang dapat memobilisasi massa melalui pesantren dan jaringan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Tilly (1978) menegaskan bahwa mobilisasi politik efektif membutuhkan interaksi antara kepentingan, organisasi, mobilisasi sumber daya, serta peluang politik, yang dalam

praktiknya sering dipengaruhi oleh faktor represi atau fasilitasi dalam sistem kekuasaan.

Mobilisasi politik oleh kiai dalam Pemilihan Presiden 2024 melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Jawa Timur mencerminkan bagaimana pemimpin informal tetap memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik demokratis. Dengan pendekatan persuasif, pemanfaatan ikatan emosional, serta identitas kolektif, kiai mampu mendorong partisipasi politik santri dan masyarakat pesantren. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memasuki era demokrasi modern, kepemimpinan informal masih memainkan peran krusial dalam membentuk lanskap politik, khususnya di kalangan santri. Mobilisasi ini tidak hanya bertujuan memenangkan kandidat, tetapi juga merepresentasikan kesinambungan hubungan kuasa dan kepemimpinan dalam struktur sosial masyarakat Jawa Timur.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe studi kasus untuk menganalisis peran kiai dalam mobilisasi politik melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) untuk Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Jawa Timur. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan pengamatan secara detail dan mendalam terhadap fenomena ini.

Penelitian dilaksanakan di beberapa

lokasi strategis, meliputi tiga pondok pesantren di Jawa Timur (Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Nurur Rohman Sidoarjo, dan Al-Amanah Junwangi), sekretariat Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Prabowo-Gibran, serta melalui komunikasi daring. Subjek penelitian terdiri dari figur-figur kunci dalam struktur JKSN, termasuk Penasihat dan Wakil Ketua JKSN, kiai di Jawa Timur yang tergabung dalam JKSN, serta anggota Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran.

Untuk pengumpulan data, peneliti mengandalkan kombinasi sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber dan dokumentasi visual. Sementara data sekunder dikumpulkan dari penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan sumber-sumber daring terkait.

Metode wawancara mendalam menjadi teknik utama pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara intensif dengan para informan. Berbeda dengan wawancara terstruktur, pendekatan ini menciptakan suasana yang lebih dinamis dan alamiah, menghasilkan perspektif yang lebih otentik dari para kiai. Untuk memperkuat validitas temuan, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yang mencakup studi pustaka tentang JKSN, serta dokumentasi visual selama proses wawancara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan JKSN Mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Jawa Timur

Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) muncul sebagai salah satu kekuatan politik berbasis keagamaan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan para kiai memiliki pertimbangan matang sebelum memberikan dukungan politik. Keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor yang dianggap relevan dan sesuai dengan kepentingan umat serta visi kepemimpinan yang diharapkan.

1. Dukungan terhadap Kompetensi dan Keahlian Pasangan

1) Menyelamatkan Indonesia dari Ancaman Global

Salah satu pertimbangan utama JKSN mendukung Prabowo-Gibran adalah kompetensi dalam menghadapi ancaman global. Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menghadapi dampak konflik global seperti perang Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel yang melibatkan kekuatan besar dunia. Prabowo dengan latar belakang militernya dinilai memiliki pemahaman mendalam tentang strategi militer, taktik pertahanan, dan diplomasi internasional sehingga mampu memosisikan Indonesia secara tepat di tengah ketegangan internasional. Pengalaman Prabowo sebagai pemimpin militer dianggap relevan untuk memetakan ancaman potensial dan merancang langkah-

langkah mitigasi efektif untuk melindungi Indonesia dari dampak konflik global.

2) Menyelamatkan Indonesia dari Ancaman Nasional

Ancaman disintegrasi bangsa juga menjadi perhatian serius yang mendasari dukungan JKSN. Beberapa wilayah Indonesia telah lepas seperti Timor Timur, Pulau Irian dan Sipadan, serta adanya gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagai mantan perwira tinggi TNI, Prabowo dianggap memiliki kompetensi dalam bidang pertahanan dan keamanan yang krusial untuk menghadapi tantangan disintegrasi. Pengalaman Prabowo di dunia militer dan Kementerian Pertahanan menjadi bukti konkret bahwa ia memahami kompleksitas geopolitik dan strategi pertahanan yang diperlukan untuk menangkal ancaman dari dalam maupun luar negeri.

2. Faktor Ideologi dan Nasionalisme

1) Melindungi Indonesia dari Ancaman Ideologi Bangsa

JKSN mendukung Prabowo-Gibran karena keyakinan bahwa pasangan ini memiliki komitmen kuat dalam membela ideologi Pancasila dari ancaman ekstremisme, khususnya dari kelompok ekstrim kiri. Sejarah mencatat bahwa gerakan ekstrem kiri pernah berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi komunisme, seperti dalam pemberontakan PKI Madiun 1948 dan upaya kudeta PKI

1965. Dalam perspektif JKSN, NU dan TNI memiliki peran historis yang besar dalam mempertahankan Pancasila dari ancaman komunisme, dan pasangan Prabowo-Gibran dianggap merepresentasikan sinergi tersebut. Prabowo sebagai mantan perwira tinggi TNI dan kedekatannya dengan ulama serta komunitas santri menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya peran agama dalam membangun ketahanan ideologi bangsa.

2) Gibran Sebagai Representasi Kawula Muda dan Joko Widodo

Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo dinilai sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Jokowi yang dianggap sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama. Gibran dianggap sebagai representasi generasi muda yang mewarisi semangat kepemimpinan ayahnya dan kesinambungan kebijakan Jokowi, termasuk kebijakan yang mendukung NU dan santri.

3. Faktor Ekonomi dan Sosial

1) Menjanjikan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Program makan gratis dan susu gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran dianggap sebagai solusi konkret untuk mengatasi problem kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Program ini menysasar kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita yang

secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Dengan adanya jaminan makanan dan asupan gizi yang memadai, tingkat kelaparan dapat ditekan, serta kualitas hidup masyarakat miskin bisa meningkat. Program ini juga dapat mengurangi tingkat stres dan frustrasi masyarakat akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.

2) Keberlanjutan Program Hilirisasi

Keberanian Prabowo untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi menjadi faktor penting dalam dukungan JKSN. Program hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan mengolahnya di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan nasional hingga ratusan kali lipat, membuka peluang bagi berkembangnya industri manufaktur dalam negeri, dan menciptakan efek domino yang besar bagi perekonomian nasional. Dengan meningkatnya pendapatan negara dari sektor hilirisasi, berbagai program kesejahteraan rakyat termasuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dapat lebih mudah direalisasikan.

3) Kepentingan Ideologis dan Moral

Keteguhan dan konsistensi Prabowo sebagai figur politik yang pantang menyerah meskipun telah mengalami kekalahan berkali-kali menjadi alasan JKSN memberikan dukungan penuh. JKSN memandang Prabowo bukan hanya sebagai

sosok yang gigih, tetapi juga sebagai calon pemimpin yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan dan tidak menyengsarakan rakyat. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai keumatan, JKSN menciptakan gerakan politik yang berintegritas, tidak hanya bertujuan untuk memenangkan pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin terpilih mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

4) Kepentingan Historis dan Kultural

Dukungan JKSN juga didasarkan pada kesadaran bahwa kiai dan santri memiliki peran historis dalam membangun bangsa dan menentukan arah kepemimpinan nasional. Sebagai bagian dari kelompok yang telah lama berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, kiai dan santri tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang menentukan masa depan negara. Keterlibatan JKSN dalam politik merupakan upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para ulama dan pendiri bangsa tetap menjadi pedoman dalam kepemimpinan nasional.

5) Kepentingan Pragmatis

Meskipun aspek idealistik dominan dalam dukungan JKSN, terdapat juga faktor pragmatis yang turut berpengaruh, seperti kemungkinan adanya bantuan untuk pesantren atau peluang mendapatkan jabatan tertentu. Namun, ini tidak mengurangi esensi utama dukungan yang

tetap berorientasi pada kepentingan yang lebih luas dan pencapaian cita-cita kemerdekaan, yakni menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil, dan nyaman dalam bernegara. Kepentingan pragmatis ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa institusi keagamaan seperti pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, dukungan para kiai JKSN terhadap Prabowo-Gibran merupakan sintesis dari berbagai pertimbangan yang mencakup aspek pertahanan, ideologi, ekonomi, moral, historis, dan pragmatis, yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Proses Mobilisasi Politik Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) untuk Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024 di Jawa Timur

Dalam kontestasi elektoral, mobilisasi politik menjadi instrumen kunci, terutama dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan kultural yang kuat. Di Jawa Timur, Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) memainkan peran penting dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Kekuatan utama mereka terletak pada jaringan kiai dan pesantren yang tersebar luas. Fenomena ini dapat dipahami melalui Konsep Mobilisasi Politik Charles Tilly

(1978) yang menjelaskan bahwa mobilisasi politik merupakan aksi kolektif yang muncul karena adanya kepentingan bersama dan didukung oleh organisasi, sumber daya, peluang politik, serta kekuatan aktor.

1. Struktur Organisasi dan Pengelolaan JKSN

Keberhasilan JKSN dalam memobilisasi dukungan di Jawa Timur tidak lepas dari struktur organisasi dan pengelolaan yang efektif. Dengan cakupan 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, JKSN menerapkan struktur desentralisasi yang memungkinkan gerak cepat dan adaptif di setiap daerah. Perlu dipahami bahwa dukungan para kiai kepada Prabowo-Gibran bukanlah keputusan spontan atau individual, melainkan bagian dari strategi politik yang terorganisir dengan baik.

Kiai Asep, sebagai pendiri dan penasihat JKSN, menjadi tokoh sentral dalam pembentukan jaringan ini. Berkolaborasi dengan Muhammad Ghofirin (Gus Ghofirin) yang menjabat sebagai Sekjen Program One Pesantren One Product (OPOP) sekaligus Sekjen JKSN, Kiai Asep mengajak kiai-kiai di Jawa Timur untuk bergabung. Proses ini menciptakan efek domino saat kiai yang telah bergabung turut mengajak kiai lainnya, sehingga jaringan terus bertumbuh secara organik.

Struktur JKSN dirancang layaknya organisasi politik profesional dengan koordinasi yang jelas dan hierarki yang

tertata. Kepemimpinan terdiri dari dewan penasihat, dewan pakar, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Struktur yang sistematis ini memungkinkan koordinasi yang efektif antara JKSN tingkat provinsi dan daerah, sehingga strategi politik menjadi lebih terarah dalam menjangkau pemilih.

Kehadiran perwakilan dari setiap kota/kabupaten menunjukkan bahwa dukungan JKSN bukan sekadar pendapat pribadi para kiai, tetapi merupakan hasil dari proses kolektif yang terencana. Struktur organisasi ini menjadikan JKSN sebagai alat mobilisasi politik yang efektif dengan jaringan komunikasi dan distribusi informasi yang kuat terkait pilihan politik yang mereka rekomendasikan.

2. Strategi Mobilisasi Politik

Mobilisasi politik JKSN tidak berhenti pada pembentukan jaringan, tetapi berlanjut pada implementasi strategi konkret untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Para kiai, sebagai pemimpin informal yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat pesantren, memainkan peran penting dalam mengarahkan dukungan melalui pendekatan yang sesuai dengan budaya santri.

JKSN menunjukkan pola unik yang berbeda dari kampanye politik pada umumnya. Alih-alih mengandalkan kampanye akbar dengan kehadiran massa dalam jumlah besar, mereka lebih memilih pendekatan berbasis jaringan keagamaan

yang meskipun terkesan subtil, namun sangat efektif dalam membentuk opini politik masyarakat santri.

Sosialisasi dan kampanye melalui jaringan pesantren menjadi strategi utama JKSN. Mereka menyebarkan dukungan terhadap Prabowo-Gibran dengan cara menempelkan flyer di lokasi-lokasi strategis, dengan pola distribusi yang disesuaikan dengan karakteristik politik masing-masing pesantren. Pesantren yang memiliki keterlibatan politik lebih kuat tidak segan memasang materi kampanye langsung di lingkungan mereka dan memberikan pengarahan kepada jamaah. Sementara pesantren yang cenderung menjaga jarak dari politik praktis lebih memilih menggunakan tempat-tempat umum seperti masjid desa untuk menyebarkan informasi.

Yang menarik, peran JKSN dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran lebih banyak dilakukan di balik layar. Menurut Tim Kampanye Daerah (TKD), aktivitas JKSN di posko pemenangan resmi maupun kampanye akbar tidak terlihat signifikan. Mereka lebih fokus pada strategi berbasis jaringan kiai dan pesantren, di mana pengaruh mereka lebih banyak disalurkan melalui pertemuan kiai, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kiai Asep sebagai Pembina JKSN dengan pengaruh besar di Jawa Timur dan Gus Ghofirin sebagai Sekjen JKSN menjadi tokoh kunci dalam pengelolaan jaringan ini. Meskipun tidak terlibat langsung dalam

kampanye terbuka, JKSN tetap menjalankan perannya dalam menggalang dukungan politik dengan mengumpulkan massa melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki daya tarik kuat bagi masyarakat santri.

Pendekatan JKSN yang berbasis pada kekuatan jaringan informal dan nilai-nilai keagamaan terbukti memberikan dampak yang besar meskipun tidak selalu tampak langsung di panggung politik formal. Para kiai JKSN secara konsisten menghindari kampanye terbuka, dan lebih memilih jalur yang lebih halus namun memiliki pengaruh kuat melalui sosialisasi kepada santri dan pengikut mereka. JKSN memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada dalam komunitas pesantren sebagai saluran mobilisasi politik yang efektif, dengan kegiatan keagamaan rutin seperti istighosah, doa bersama, dan pembacaan sholawat menjadi momentum penting.

3. Represi dan Fasilitasi dalam Mobilisasi Politik

Keberhasilan suatu gerakan mobilisasi politik tidak hanya ditentukan oleh strategi dan sumber daya, tetapi juga oleh tantangan dan hambatan selama pelaksanaannya. Meskipun mobilisasi politik JKSN berlangsung secara sistematis, proses ini tidak lepas dari dinamika represi dan fasilitasi yang mewarnai perjalanannya.

JKSN menghadapi beberapa hambatan internal dalam proses mobilisasi. Kesibukan para kiai sebagai pemimpin pesantren

menjadi kendala utama, mengingat tanggung jawab mereka yang besar dalam pengelolaan pendidikan dan kegiatan keagamaan seringkali membatasi keterlibatan dalam agenda politik. Beberapa kiai bahkan tidak berani meninggalkan pesantren karena belum memiliki wakil yang mumpuni, sehingga khawatir pesantren tidak akan berjalan dengan optimal. Namun, loyalitas tinggi yang menjadi karakteristik internal JKSN berhasil memitigasi dampak dari hambatan tersebut.

Dari sisi eksternal, JKSN menghadapi tantangan berupa perbedaan pilihan politik dengan kiai-kiai di luar jaringan mereka. Mengingat besarnya pengaruh kiai terhadap santri dan masyarakat sekitar, ketidakselarasan pilihan politik ini berpotensi menciptakan resistensi. Tantangan lainnya berupa upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk menduplikasi JKSN, namun upaya tersebut tidak berhasil karena JKSN memiliki basis yang kuat dalam hal jaringan, kepercayaan masyarakat, dan kesamaan visi. Potensi penolakan dari masyarakat umum juga menjadi bentuk represi yang harus dihadapi, namun resistensi publik terhadap JKSN relatif kecil. Hal ini tidak lepas dari pendekatan politik mereka yang mengedepankan kesadaran politik daripada praktik money politics. Dengan berfokus pada pendidikan politik dan mendorong proses berpikir rasional dalam pemilihan pemimpin, JKSN berhasil menghindari resistensi yang umumnya muncul akibat

kampanye yang agresif atau manipulatif.

Selain menghadapi represi, keberhasilan JKSN juga ditopang oleh adanya fasilitasi yang mendukung kelancaran mobilisasi. Menariknya, fasilitasi dalam JKSN lebih banyak dilakukan secara sukarela oleh para kiai yang tergabung di dalamnya. Kiai Asep berperan besar dalam menyediakan alat peraga kampanye dan dukungan finansial untuk koordinasi kegiatan. Meskipun tidak ada sistem iuran resmi, para kiai JKSN secara sukarela menggunakan fasilitas pribadi mereka tanpa keberatan karena tergerak oleh visi dan misi bersama.

Fasilitasi mobilisasi politik JKSN tidak bersandar pada mekanisme insentif material, tetapi lebih pada penguatan jaringan sosial dan kepercayaan di antara umat. JKSN menegaskan bahwa gerakan mereka bersifat murni tanpa melibatkan praktik transaksional seperti pemberian beras atau insentif material lainnya kepada massa. Mereka juga menekankan bahwa gerakan mereka tidak didanai oleh pasangan calon atau tim pemenang daerah, melainkan digerakkan secara sukarela oleh para kiai di dalamnya.

Hal yang menarik, terdapat perbedaan pandangan di antara kiai JKSN sendiri mengenai motivasi keterlibatan mereka. Beberapa kiai menegaskan bahwa gerakan JKSN adalah murni tanpa tendensi apapun, sementara yang lain mengakui adanya kepentingan pragmatis meskipun tidak dominan. Perbedaan pandangan ini

mencerminkan bahwa JKSN bukanlah entitas yang homogen dalam hal motivasi anggotanya, namun tetap fokus pada tujuan utama yaitu mendukung pemimpin yang dianggap tepat untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

4. Peluang dan Ancaman dalam Mobilisasi Politik

Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) berhasil menjadi katalisator penting dalam menggerakkan dukungan massa untuk pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Jawa Timur. Keberhasilan ini didasari oleh kemampuan JKSN mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang politik. Peluang utama yang dioptimalkan JKSN adalah kedekatan dengan tokoh-tokoh politik berpengaruh di Jawa Timur, terutama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal namun memiliki akar kultural yang kuat, mengingat posisi Khofifah sebagai tokoh dari tradisi pesantren dan NU di Jawa Timur.

JKSN secara cerdas memanfaatkan rekam jejak positif kepemimpinan Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur menjadi narasi politik yang efektif. Kesuksesan kinerja dan ratusan penghargaan yang diperoleh Khofifah digunakan untuk membangun kepercayaan pemilih terhadap kemampuan kepemimpinan serupa di tingkat nasional. Strategi ini sangat efektif karena masyarakat

Jawa Timur dapat merasakan langsung manfaat dari kepemimpinan Khofifah, sehingga lebih mudah menerima argumentasi serupa untuk kepemimpinan di tingkat nasional.

Selain itu, JKSN juga mentransformasi narasi kegagalan Prabowo dalam pilpres sebelumnya menjadi nilai positif tentang keteguhan dan semangat juang. Dengan membingkai perjalanan politik Prabowo dalam kerangka nilai-nilai tersebut, JKSN berhasil menciptakan resonansi kultural yang kuat dengan basis konstituennya. Keberhasilan mobilisasi massa JKSN juga tidak terlepas dari peran sentral KH. Asep Saifuddin Chalim sebagai figur utama dalam jaringan ini. Keberadaan Khofifah dan Kiai Asep yang memiliki legitimasi di ranah politik dan keagamaan memudahkan konsolidasi jaringan pesantren serta membangun kepercayaan di kalangan konstituen.

Dalam konteks ancaman, terdapat variasi pendekatan di kalangan tokoh JKSN terkait mobilisasi politik. Beberapa tokoh cenderung lebih tegas dalam mengarahkan pilihan politik pengikut mereka, sementara yang lain lebih menekankan prinsip demokratis yang menghormati keragaman pilihan politik. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan variasi dalam interpretasi peran JKSN, pemahaman tentang relasi antara otoritas keagamaan dan politik, serta strategi komunikasi politik yang berbeda. Meski

demikian, perbedaan ini bukanlah bentuk pertentangan, melainkan variasi pendekatan dalam menjalankan mobilisasi politik di lingkungan pesantren.

5. Kekuatan JKSN dalam Mobilisasi Politik

Kekuatan utama JKSN dalam mobilisasi politik terletak pada posisi kiai sebagai tokoh panutan yang dihormati oleh masyarakat. Kiai bukan hanya figur keagamaan, tetapi juga figur sosial yang memiliki otoritas moral, intelektual, dan politik yang mampu mengarahkan pilihan politik santri dan jamaahnya. Dalam politik Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kiai memiliki peran strategis sebagai pemimpin informal yang mampu mempengaruhi keputusan politik pengikutnya.

Faktor penting lainnya adalah kepercayaan dan loyalitas masyarakat Jawa Timur terhadap para kiai. Ketika seorang kiai memberikan dukungan kepada suatu pasangan calon, hal itu sering diinterpretasikan sebagai bentuk "restu" yang memiliki legitimasi religius. Dukungan JKSN tidak hanya membantu mengkonsolidasikan suara dari kalangan tradisional, tetapi juga membangun narasi bahwa pasangan Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Jawa Timur sendiri memiliki peran sentral sebagai salah satu wilayah dengan

jumlah pesantren terbesar yang tergabung dalam JKSN. Dengan cakupan sekitar 60-70% dari total pesantren di Jawa Timur, JKSN memiliki jangkauan luas yang telah menyebar secara merata di seluruh 38 kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki basis yang kuat dalam komunitas pesantren dan santri di Jawa Timur.

Temuan penting lainnya adalah adanya keterkaitan strategis antara JKSN dengan program One Pesantren One Product (OPOP) yang diinisiasi oleh Gubernur Khofifah. Program OPOP bertujuan mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan usaha berbasis pondok pesantren. Keterlibatan pesantren-pesantren OPOP dalam JKSN menunjukkan adanya sinergi antara pemberdayaan ekonomi pesantren dengan penguatan jejaring politik di tingkat akar rumput.

Fenomena ini mencerminkan pola hubungan simbiosis antara program pemberdayaan ekonomi dengan pengaruh politik. Di satu sisi, pesantren mendapatkan manfaat ekonomi melalui program OPOP. Di sisi lain, ikatan yang terbentuk melalui program tersebut menjadi modal sosial bagi mobilisasi dukungan politik pada Pilpres 2024.

6. Hasil dan Evaluasi Mobilisasi JKSN

Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) terbukti menjadi salah satu faktor kunci

dalam mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 di Jawa Timur. JKSN berhasil memobilisasi dukungan secara masif dan membangun jaringan yang solid dan berpengaruh, terutama melalui basis pondok pesantren dan keterlibatan tokoh-tokoh penting seperti Bu Khofifah dan Kiai Asep.

Keberhasilan JKSN tidak lepas dari strategi yang mengandalkan pendekatan kultural dan keagamaan, yang mampu menyentuh hati dan pikiran massanya. Keberhasilan Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur memberikan legitimasi dan pengaruh yang kuat, memudahkan arahan dan koordinasi JKSN untuk mendukung Prabowo-Gibran. Tingkat kepercayaan dan keselarasan yang tinggi di antara anggota JKSN menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Strategi mobilisasi yang dilakukan oleh JKSN tidak hanya mengandalkan dukungan moral dari para kiai, tetapi juga diterjemahkan dalam bentuk gerakan yang terorganisir dan masif. Jaringan pesantren yang tersebar luas memberikan fondasi yang kuat bagi pergerakan ini, memungkinkan JKSN untuk menjadi kekuatan politik yang berpengaruh dalam menentukan arah dukungan masyarakat santri.

Aspek penting dalam evaluasi mobilisasi adalah bagaimana JKSN menghadapi perubahan dinamika politik di kalangan pengikutnya yang semakin kritis. Jika pada

masa lalu keputusan kiai cenderung diikuti tanpa banyak pertanyaan, kini masyarakat, termasuk kalangan santri, lebih aktif dalam mempertanyakan dan mengkritisi pilihan politik yang direkomendasikan oleh tokoh agama.

Pengalaman JKSN dalam Pemilihan Presiden 2024 mengajarkan bahwa keberhasilan mobilisasi politik berbasis keagamaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas jaringan yang dimiliki, tetapi juga oleh sejauh mana organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan dinamika politik umat. Dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap kritik serta membangun komunikasi berbasis rasionalitas, mobilisasi politik di masa depan dapat lebih efektif dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kiai dalam Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 di Jawa Timur didorong oleh berbagai faktor yang kompleks dan multidimensi. Pertama, dukungan kiai terhadap Prabowo-Gibran didasarkan pada pertimbangan kompetensi dan keahlian pasangan tersebut, terutama dalam menghadapi ancaman global dan nasional. Prabowo, dengan latar belakang militer yang kuat, dianggap mampu menjaga

stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia, sementara Gibran, sebagai representasi generasi muda, diharapkan dapat membawa pembaruan dan kesinambungan kebijakan. Kedua, faktor ideologi dan nasionalisme juga menjadi alasan utama, di mana kiai JKSN melihat Prabowo-Gibran sebagai pasangan yang mampu mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi ekstrem, khususnya komunisme serta melanjutkan warisan kepemimpinan Joko Widodo yang dianggap pro-NU dan santri. Ketiga, janji kesejahteraan sosial-ekonomi, terutama program makan gratis dan keberlanjutan hilirisasi, menjadi daya tarik utama bagi kiai yang peduli terhadap kesejahteraan umat. Keempat, faktor ideologis dan moral, di mana kiai mencerdaskan umat dalam memilih pemimpin. Kelima, faktor historis dan kultural juga turut memengaruhi, di mana kiai dan santri merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menentukan arah kepemimpinan nasional yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Terakhir yaitu adanya sedikit kepentingan pragmatis seperti bantuan untuk pesantren dan suatu jabatan.

Proses mobilisasi politik yang dilakukan oleh kiai JKSN di Jawa Timur menunjukkan pola yang unik dan efektif, mengandalkan jaringan pesantren dan otoritas moral kiai sebagai pemimpin informal. Mobilisasi ini dilakukan melalui pendekatan kultural dan

keagamaan, seperti pengajian, istighosah, dan per-temuan kiai, yang memungkinkan mereka memengaruhi pilihan politik masyarakat tanpa perlu terlibat dalam kampanye terbuka yang bersifat demonstratif. Struktur organisasi JKSN yang terdesentralisasi dan terkoordinasi dengan baik memungkinkan penyebaran dukungan secara merata di seluruh Jawa Timur. Selain itu, JKSN juga memanfaatkan relasi strategis dengan tokoh-tokoh politik lokal, seperti Gubernur Khofifah Indar Parawansa, untuk memperkuat dukungan terhadap Prabowo-Gibran. Dengan ini JKSN berhasil memobilisasi dukungan secara masif dan membangun jaringan yang solid serta berpengaruh di wilayah Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 2024.

F. SARAN

Berdasarkan temuan penulisan, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas mobilisasi politik berbasis keagamaan di masa depan, sebagaimana berikut:

1. JKSN perlu lebih peka terhadap dinamika perubahan sosial dan politik, terutama di kalangan generasi muda yang semakin kritis dan selektif. Pendekatan inklusif dan dialogis akan membantu menjaga relevansi gerakan politik berbasis keagamaan di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis.

2. Dalam memperluas jangkauan mobilisasi politik, JKSN dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial. Platform digital dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan pesan politik kepada generasi muda dan masyarakat urban yang mungkin kurang terjangkau melalui metode tradisional.
3. JKSN harus menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan. Keterlibatan dalam politik tidak boleh mengorbankan peran utama mereka sebagai pemimpin spiritual yang bertugas membimbing umat.
4. JKSN perlu mempertahankan dan mengembangkan jaringan yang telah dibangun, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi seperti OPOP. Sinergi antara pemberdayaan ekonomi dan mobilisasi politik dapat menjadi model efektif untuk memperkuat basis dukungan politik di masa depan, asalkan esensi program pemberdayaan ekonomi tetap terjaga.

Dengan menerapkan saran-saran ini, JKSN dapat tetap menjadi kekuatan politik yang relevan dan efektif dalam menentukan arah kepemimpinan nasional, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang menjadi landasan gerakan mereka.

G. DAFTAR PUSTAKA

Assiddiq, Dafis U. (2020). Menakar Peran

- Kiai Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Di Provinsi Jawa Timur). *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 191–208. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.505>
- Bramantyo, R. Y., & Kusumaningrum, D. (2024). Peran pemimpin informal dalam upaya pemberdayaan ekonomi komunitas kerajinan lokal bali. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 253–262.
- Dewi, Silvia (2019) Keterlibatan Pesantren Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Mobilisasi Jaringan Santri Untuk Jokowi Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Tasikmalaya). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.
- Diani, Mario & Doug McAdam. (2003). *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Oxford University Press.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2024). Rapat Pleno Provinsi Usai, Berikut Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2024 di Jawa Timur. Retrieved November 20, 2024, from <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/rapat-pleno-provinsi-usai-berikut-hasil-rekapitulasi-suara-pilpres-2024-di-jawa-timur>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
- Komisi Pemilihan Umum. (2023, November 13). KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024. Dipetik Desember 1, 2023, dari kpu.go.id: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penulisan kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Liow, M. R., Laloma, A., & Pesoth, W. (2015). Peranan Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Malola. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(031). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/8724>
- Mukari, M., Muharam, M. M., & Fithriyyah, M. U. (2022). Kiai Sebagai Kekuatan Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5(1), 1-32. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.12671>
- Patoni, Ahmad. (2019). *Kiai Pesantren dan Dialektika Politik Kekuasaan*. Tulungagung. IAIN Tulungagung Press
- Qomar, M. (2002). *Pesantren: dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi*. Erlangga.
- Sari, M. W., (2023). *Kepemimpinan Formal dan Informal*. Dalam Adrias (Ed.), *Kepemimpinan* (hlm. 34-38). CV. Gita Lentera
- Soelistya, Djoko. (2022). *Buku Ajar Kepemimpinan Strategis*. Sidoarjo. Nizamia Learning Center
- Somma, N. M. (2023). *Resource Mobilization and Political Process Theories in Latin America*. In *The Oxford Handbook of Latin American Social Movements* (pp. 35–53). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190870362.013.3>.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriati, Istiqomah Dian. (2018). *Analisis Peran Pemimpin Informal Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Wanita Nelayan (Studi Kasus Tentang Kegiatan Sosial Wanita Nelayan Di*

Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran Surabaya). Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 21(1), 61–75. <https://doi.org/10.30649/aamama.v21i1.84>

Tilly, Charles. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York. Random House

Wahidin, A., Azis, A., & A. Tina P, D. (2017). Pemimpin Informal Dan Dinamika Sosial (Studi Kasus Lima tokoh Di Desa Allu Taroawang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto). *KOMUNIDA : Media Komunikasi Dan Dakwah*, 7(2), 169-182. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.478>

Werdiningsih, E., & B, A. (2022). Lima Pendekatan dalam Penulisan Kualitatif. *Jurnal Likhitaprajna*, 24(1), 39-50. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v24i1.217>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 7.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran RI Tahun 2017, No. 7.